

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat. Perkembangan tersebut didasari oleh adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan ini mempunyai peran untuk menentukan nasib pemerintah daerah karena daerah tersebut akan menjadi daerah yang kuat dan mampu berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola keuangannya secara baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat keutuhan aset daerah terjaga.

Dalam suatu otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila hal tersebut tidak lepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, pasal 4)

Untuk mencapai suatu pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tentunya pemerintah tersebut harus meningkatkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor strategis dan potensial. Selain itu, perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Hal tersebut dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas.

Salah satu yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya. Pemerintahan dengan laporan keuangan yang baik akan menyajikan laporan keuangannya secara transparan dan tentunya tidak terdapat keganjilan dalam penyajiannya. Laporan keuangan dengan predikat baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara :

1. UU No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
2. UU No. 63 Tahun 2019 tentang Perbendaharaan
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga Perangkat diatas menjadi dasar bagi institusi negara untuk mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012: 212).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah. Bentuk penilainnya berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD (Halim, 2012:

212). Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat bahwa akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo, 2013: 182)

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. rasio yang digunakan antara lain yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012: 230)

Menurut Halim (2012: 221-234), bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka ketergantungannya semakin rendah. Ketergantungan tersebut kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi. Untuk rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau sumber dana eksternal. Dengan catatan, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah semakin rendah tingkat ketergantungannya pada sumber dana eksternal atau dana dari pemerintah pusat (Halim, 2012: 221-234).

Rasio Efektifitas dilakukan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan setelah itu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan untuk rasio efisiensi dilakukan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengefisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2013: 112).

Kemudian untuk Rasio Keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dengan optimal (Halim, 2012: 221-234). Sedangkan untuk Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode, kinerjanya mengalami pertumbuhan apa tidak (Mahmudi, 2010: 138)

Penelitian tentang Kinerja Keuangan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Masita Machmud, George Kawung, dan Wensy Rompas dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Dimana perbedaannya, terdapat penambahan rasio keuangan dan terdapat teknik yang membandingkan rasio keuangannya dengan Kabupaten/Kota yang lain yang masih dalam satu karisidenan dan mengambil populasi dan periode tahun yang berbeda yaitu di Kabupaten Eks-Karisidenan Banyumas tahun 2013-2017

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISISRASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EKS-KARESIDENAN BANYUMAS TAHUN 2013-2017”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan lima rumusan masalah sbagia berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Efektifitas ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Keserasian ?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Pertumbuhan ?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis commonsize ?
6. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis indeks/trend ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ungkap sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Efektifitas tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Keserasian tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Pertumbuhantahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2013-2017.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis commonsize tahun 2013-2017.
6. Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas berdasarkan analisis indeks/trend tahun 2013-2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan pemerintah menggunakan rasio keuangan.

##### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Eks-Karesidenan Banyumas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

##### 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai referensi untuk membuat penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan.

#### **E. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi antara lain membahas teori yaitu teori stake holder, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, crosssection-technique, timeseries-technique, analisis commonsize, analisis indeks/trend, kinerja keuangan pemerintah, dan penelitian terdahulu . Selain itu juga terdapat pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi desain penelitian, populasi, sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel serta teknis analisis data.

### BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi antara lain hasil penelitian yang dilakukan peneliti disertai penjelasan mengenai gambaran umum pemerintah kabupaten Gunung Kidul. Selain itu juga membahas analisis data dan pembahasannya

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan dari pembahasan, keterlibatan penelitian dan saran hasil penelitian.